

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Otonomi daerah membawa angin segar untuk pemerintah daerah dalam membuka ruang kreativitas dan inovasi dalam penyelenggaraan pembangunan di daerah. Undang-undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan sebuah harapan besar akan keleluasaan daerah untuk mandiri mengoptimalkan pembangunan daerah.

Setidaknya ada tiga tujuan besar dalam pelaksanaan otonomi daerah yaitu: a) tujuan politik, yakni menghadirkan sistem demokrasi lokal melalui partai politik dan DPRD dengan tujuan adanya peningkatan pelayanan yang baik, pemberdayaan masyarakat serta terciptanya infrastruktur politik lokal yang kuat; b) tujuan administratif, yakni pembagian urusan administrasi pemerintahan antara pusat dan daerah, termasuk dalam manajemen birokrasi dan sumber keuangan serta diharapkan partisipasi publik di daerah meningkat untuk ikut mensukseskan penyelenggaraan pemerintahan daerah; c) tujuan ekonomi, yakni dengan keleluasaan pemerintah daerah diharapkan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang pada akhirnya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan meningkatnya daya saing kualitas produksi daerah.

Merujuk pada hasil studi bahwa setidaknya ada tiga misi dalam pelaksanaan otonomi daerah, yaitu: (1) menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya daerah; (2) meningkatkan kapasitas birokrasi untuk pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat; dan (3) menciptakan ruang pemberdayaan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan di daerah (Mardiasmo, 2002).

The Worldwide Governance Indicators Reports menunjukkan bahwa nilai rata-rata indeks efektivitas pemerintahan Indonesia (*Government Effectiveness*) di tahun 2014 dikategorikan masih rendah dengan nilai indeks -0,01 (peringkat 85) meskipun telah mampu menempatkan Indonesia pada kelompok tengah (percentile rank 54,81).

Di tingkat ASEAN peringkat kita masih kalah, jika dibandingkan dengan Singapura (peringkat ke-1, skor +2,19), Malaysia (peringkat ke-32, skor +1,14), Thailand (peringkat ke-62, skor +0,34), dan Filipina (peringkat ke-72, skor +0,19). Hal ini tentu menjadi tantangan tersendiri mengingat ASEAN Economic Community (MEA) telah diterapkan, dimana dukungan ASN dalam mengawal dan menjalankan kebijakan merupakan salah satu kunci kesuksesan ekonomi Indonesia.

Pemerintah masih mempunyai PR besar terkait manajemen kinerja ASN. Ada beberapa *grand design* yang sedang berjalan namun belum optimal yaitu manajemen talenta ASN, pola karir dan penghasilan berbasis merit. Hal ini menyebabkan kinerja ASN masih dinilai rendah.

Sejalan dengan apa yang dijelaskan tersebut memberikan penekanan bahwa birokrasi merupakan gerbong utama penggerak pembangunan di daerah. Selain itu birokrasi juga mempunyai peran vital sebagai mesin pembangunan daerah. Efektivitas kinerja birokrasi salah satunya bisa dilihat dari performa kepemimpinan.

Birokrasi pemerintahan berkembang sesuai arahan pemimpinnya sehingga bisa dikatakan bahwa organisasi adalah refleksi pemimpinnya. Studi mengenai bagaimana pemimpin mempengaruhi kinerja organisasi merupakan bidang kepemimpinan stratejik. Pemikiran mengenai kepemimpinan yang efektif disampaikan oleh sekelompok ahli yang mencoba menghidupkan kembali teori "trait" atau sifat-sifat utama yang

dimiliki seseorang agar dia bisa menjadi pemimpin.

Bass (1999) menyarankan bahwa kepemimpinan yang efektif mempergunakan dominasi, memiliki keyakinan diri, mempengaruhi dan menampilkan moralitas yang tinggi untuk meningkatkan kadar kharismanya. Dengan mengandalkan kharisma, dimana seorang pemimpin yang “transformational” selalu menantang bawahannya untuk melahirkan karya-karya yang inovatif serta luar biasa.

Sebagai kunci penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, pengelolaan Sumber Daya Manusia menjadi prioritas pemerintah. UU No. 5/2014 Tentang Aparatur Sipil Negara menggariskan penyelenggaraan kebijakan dan Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) dijalankan berdasarkan asas profesionalisme, proporsional, akuntabel, serta efektif dan efisien agar peningkatan kinerja birokrasi dapat tercapai.

Kabupaten Kotawaringin Timur (KOTIM) menjadi salah satu Kabupaten di Kalimantan Tengah yang giat mengarusutamakan pembangunan. Roda pembangunan berpacu cepat untuk mengejar daya saing dengan Kabupaten lainnya. Pembangunan KOTIM akan sangat bergantung pada performa birokrasinya sebagai motor pembangunan dan peran pemimpin sebagai nahkoda utama jalannya administrasi pada birokrasi tersebut.

Tugas Bupati sebagai kepala daerah adalah memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD; memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat; menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang RPJPD dan rancangan Perda tentang RPJMD kepada DPRD untuk dibahas bersama DPRD, serta menyusun dan menetapkan RKPD; menyusun dan mengajukan

rancangan Perda tentang RPJPD dan rancangan Perda tentang RPJMD kepada DPRD untuk dibahas bersama DPRD, serta menyusun dan menetapkan RKPD; mewakili Daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; mengusulkan pengangkatan wakil kepala daerah; dan melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sementara kewenangan Kepala Daerah adalah mengajukan rancangan Perda; menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD; menetapkan Perkada dan keputusan kepala daerah; mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak yang sangat dibutuhkan oleh Daerah dan atau masyarakat; melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menurut observasi awal peneliti mendapati fenomena kepemimpinan yang kuat oleh bupati terhadap para unit birokrasi dibawahnya. Seiring ekspektasi masyarakat terhadap performa ASN maka Kabupaten Kotawaringin Timur urgen untuk meningkatkan kinerja aparaturnya. Oleh karena itu berangkat dari fenomena tersebut, penulis tertarik untuk menganalisis lebih mendalam tentang kepemimpinan transformatif Bupati pada lingkup Kabupaten Kotawaringin Timur.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Kepemimpinan Transformasional Bupati di Kabupaten Kotawaringin Timur?
2. Apa Faktor Pendukung dan Penghambat Kepemimpinan Transformasional

Bupati di Kabupaten Kotawaringin Timur?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan gaya kepemimpinan Bupati Kotawaringin Timur.
2. Untuk mengidentifikasi faktor-faktor apa saja yang menjadi pendukung dan penghambat kepemimpinan transformasional Bupati Kotawaringin Timur.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini memiliki manfaat secara teoritis yaitu;

- a. Pengembangan ilmu pengetahuan pada bidang administrasi publik;
- b. Menjadi acuan dan khasanah ilmu pengetahuan tentang administrasi publik khususnya pada aspek kepemimpinan, kebijakan publik dan pengambilan keputusan serta kinerja pemerintahan;
- c. Memperdalam pemahaman teoritis tentang efektifas gaya kepemimpinan dalam konteks birokrasi sesuai dengan pengkajiannya;
- d. Memperdalam pemahaman teoritis tentang kinerja Pemerintah dalam konteks birokrasi sesuai dengan pengkajiannya;
- e. Mengembangkan dan melahirkan konsep/teori baru tentang model pelaksanaan pemeritahan sebagai hasil empiris yang berkontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya disiplin ilmu administrasi publik.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara praktis yaitu:

a. Bupati Kotawaringin Timur

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmu pengetahuan tentang kepemimpinan transformasional kepada Bupati Kotawaringin Timur, sehingga Bupati dapat meningkatkan kualitas kepemimpinannya untuk mencapai tujuan yang diharapkan.

b. Bagi Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD)

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi sekaligus motivasi agar setiap Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) di Kabupaten Kotawaringin Timur dapat menjalankan fungsinya secara efektif dan efisien.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat terkait gaya kepemimpinan Bupati Kotawaringin Timur dalam menjalankan roda pemerintahan di Kabupaten Kotawaringin Timur.